



Vol. 6 No. 1, Januari – April 2026

Copyright © 2026, is licensed under a CC-BY-NO-SA

Halaman: 339-359

Publisher: Islamic and Multicultural Education Foundation

<https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/index>

e-ISSN: 2807-7334

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LITERASI DIGITAL DALAM MENCEGAH DISINFORMASI DAN MENINGKATKAN ETIKA KOMUNIKASI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

Muhammad Irham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

muhammad4004253005@uinsu.ac.id

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

hasansazali@uinsu.ac.id

Received: 17 Maret 2026

Accepted: 22 April 2026

Published: 30 April 2026

Abstrak

Transformasi komunikasi digital di perguruan tinggi memperluas akses mahasiswa terhadap pengetahuan, tetapi sekaligus meningkatkan paparan terhadap disinformasi, manipulasi visual, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan praktik komunikasi yang tidak etis. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan literasi digital dalam mencegah disinformasi dan meningkatkan etika komunikasi mahasiswa dengan menelaah desain kebijakan, pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta model penguatan yang relevan bagi perguruan tinggi. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif terhadap 32 sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang diterbitkan pada 2020–2025, ditelusuri melalui basis data ilmiah dan situs lembaga resmi, kemudian dianalisis melalui pemetaan sumber, pengodean tematik, perbandingan antarsumber, dan sintesis argumentatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan literasi digital yang efektif tidak cukup dilaksanakan melalui seminar insidental, tetapi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, pembelajaran berbasis kasus, layanan perpustakaan, tata kelola kemahasiswaan, komunikasi kelembagaan, teknologi informasi, dan mekanisme penanganan pelanggaran; model yang dihasilkan mencakup lima dimensi, yaitu regulasi, pendidikan, budaya, teknologi, dan akuntabilitas, dengan keberhasilan yang ditentukan oleh komitmen pimpinan, kompetensi dosen, kolaborasi lintas unit, partisipasi mahasiswa, serta evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Digital, Disinformasi, Etika Komunikasi, Mahasiswa, Perguruan Tinggi.



Abstract

The transformation of digital communication in higher education has expanded students' access to knowledge while simultaneously increasing their exposure to disinformation, manipulated visuals, hate speech, privacy violations, and unethical communication practices. Therefore, this study aims to analyze the implementation of digital literacy policies in preventing disinformation and strengthening students' communication ethics by examining policy design, program implementation, supporting and inhibiting factors, and an institutional strengthening model. This study employed an integrative literature review of 32 scholarly sources and policy documents published between 2020 and 2025, identified through academic databases and official institutional websites, and analyzed through source mapping, thematic coding, cross-source comparison, and argumentative synthesis. The findings indicate that effective digital literacy policy cannot rely on occasional seminars but must be embedded in curricula, case-based learning, library services, student governance, institutional communication, information technology, and procedures for handling digital misconduct; the resulting model consists of five interconnected dimensions regulation, education, culture, technology, and accountability whose successful implementation depends on leadership commitment, lecturer competence, cross-unit collaboration, student participation, and continuous evaluation.

Keywords: Digital Literacy, Disinformation, Communication Ethics, Students, Higher Education.

PENDAHULUAN

Transformasi komunikasi digital telah menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang produksi, pertukaran, dan distribusi informasi yang berlangsung hampir tanpa jeda melalui media sosial, aplikasi percakapan, sistem pembelajaran daring, serta kecerdasan buatan generatif. Perubahan ini memperluas akses mahasiswa terhadap pengetahuan, tetapi sekaligus meningkatkan paparan terhadap berita palsu, manipulasi visual, potongan video tanpa konteks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, plagiarisme digital, dan keluaran kecerdasan buatan yang tampak meyakinkan tetapi tidak selalu faktual. Disinformasi menjadi krusial karena tidak sekadar mengandung kekeliruan, melainkan melibatkan upaya sengaja untuk menipu, memanipulasi, atau mengarahkan persepsi publik (Wardle, 2018). Dalam konteks akademik, kerentanan tersebut dapat menurunkan mutu penalaran, integritas ilmiah, dan kepercayaan terhadap sumber pengetahuan; secara praktis, penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat merusak reputasi individu maupun institusi serta memperburuk relasi sosial mahasiswa. Karena itu, literasi media dan informasi perlu dipahami sebagai kemampuan kritis dan etis, bukan hanya keterampilan mengoperasikan perangkat (UNESCO, 2021b). Kehadiran kecerdasan buatan generatif semakin memperkuat urgensi kebijakan kampus yang melindungi privasi, menjamin transparansi penggunaan, dan menempatkan tanggung jawab akhir pada manusia (Boonlue, 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas literasi digital melalui beberapa jalur utama. Kajian Spante et al (2018) dan Zhao et al (2021) memetakan konsep kompetensi digital di pendidikan tinggi, tetapi sebagian besar penelitian masih menekankan definisi,



pengukuran keterampilan, dan kesiapan individu. Wineburg & McGrew (2019) menunjukkan pentingnya *lateral reading* untuk menilai kredibilitas sumber, sedangkan Guess et al (2020) menemukan bahwa intervensi literasi media dapat meningkatkan kemampuan membedakan berita arus utama dan berita palsu. Jones-Jang et al (2021) juga menegaskan bahwa literasi informasi berkontribusi terhadap identifikasi berita palsu, sementara Roozenbeek et al (2022) membuktikan bahwa inokulasi psikologis dapat meningkatkan ketahanan terhadap teknik manipulasi. Meskipun demikian, penelitian tersebut umumnya menguji intervensi tertentu, kemampuan individual, atau konteks paparan informasi sehingga belum banyak menjelaskan penerjemahan temuan tersebut menjadi kebijakan perguruan tinggi yang terintegrasi. Kekurangan utama literatur terletak pada terbatasnya sintesis yang menghubungkan kurikulum, etika komunikasi, tata kelola kemahasiswaan, layanan perpustakaan, teknologi informasi, penanganan pelanggaran, dan evaluasi kelembagaan. Akibatnya, program literasi digital di kampus sering berhenti pada seminar, kampanye, atau pelatihan sesaat tanpa capaian pembelajaran, pembagian tanggung jawab, indikator keberhasilan, serta mekanisme akuntabilitas yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan merespons kekurangan tersebut dengan menyusun sintesis integratif mengenai implementasi kebijakan literasi digital untuk mencegah disinformasi dan meningkatkan etika komunikasi mahasiswa di perguruan tinggi. Secara khusus, kajian ini menganalisis empat masalah, yaitu desain kebijakan literasi digital yang diperlukan; bentuk penerapannya dalam kurikulum, pembelajaran, dan tata kelola kampus; faktor pendukung serta penghambat implementasi; dan model penguatan yang dapat menjamin keberlanjutan program. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian mengintegrasikan temuan empiris, artikel konseptual, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga resmi, kemudian memetakannya melalui pengodean tematik, perbandingan antarsumber, serta sintesis argumentatif. Pendekatan ini tidak hanya menilai efektivitas teknik seperti pemeriksaan fakta, *lateral reading*, *accuracy prompts*, *prebunking*, dan koreksi, tetapi juga menempatkannya dalam struktur kelembagaan yang lebih luas. Kajian selanjutnya menghubungkan pendidikan, regulasi, budaya digital, dukungan teknologi, serta mekanisme akuntabilitas sebagai satu kesatuan kebijakan. Dengan cara tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka operasional yang dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengembangkan kompetensi verifikasi informasi, pemahaman algoritma, keamanan digital, literasi kecerdasan buatan, tanggung jawab bermedia, dan kemampuan berdialog secara beradab (OECD, 2024).

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa kemampuan mahasiswa mencegah disinformasi dan menerapkan etika komunikasi tidak akan meningkat secara berkelanjutan apabila literasi digital hanya diberikan melalui kegiatan insidental. Secara konseptual, semakin tinggi tingkat integrasi kebijakan pada dimensi regulasi, pendidikan, budaya,



teknologi, dan akuntabilitas, semakin kuat pula kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi sumber, memverifikasi klaim, melindungi privasi, menggunakan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, serta memperbaiki kesalahan komunikasi. Hubungan tersebut terjadi karena regulasi memberikan standar perilaku, kurikulum membentuk pengetahuan dan keterampilan, budaya kampus memperkuat norma tanggung jawab, teknologi menyediakan sarana verifikasi dan pengaduan, sedangkan akuntabilitas memastikan evaluasi serta perbaikan program. Namun, pengaruh kebijakan diperkirakan bergantung pada komitmen pimpinan, kompetensi dosen, kolaborasi lintas unit, partisipasi mahasiswa, pembelajaran berbasis kasus, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis konseptual bahwa pendekatan menyeluruh berbasis institusi lebih efektif daripada pendekatan parsial dalam menurunkan perilaku berbagi informasi tanpa verifikasi dan meningkatkan komunikasi digital yang jujur, aman, kritis, dan beradab. Karena penelitian menggunakan kajian literatur integratif, hipotesis tersebut tidak diuji secara statistik, tetapi dinilai melalui konsistensi pola temuan antarsumber dan digunakan sebagai dasar penyusunan model implementasi kebijakan.

LANDASAN TEORI

Landasan mengenai literasi digital, disinformasi, dan etika komunikasi di perguruan tinggi telah berkembang dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian memandang literasi digital sebagai kompetensi multidimensional yang mencakup kemampuan teknis, literasi informasi dan data, komunikasi, penciptaan konten, keamanan, serta pemecahan masalah; kecenderungan ini banyak ditemukan dalam kajian konseptual, tinjauan sistematis, dan survei kompetensi mahasiswa maupun dosen (Spante et al., 2018). Kedua, literatur berorientasi pada pengujian intervensi untuk meningkatkan kemampuan mengenali informasi palsu, seperti *lateral reading*, pemeriksaan fakta, *accuracy prompts*, dan *prebunking*, melalui eksperimen atau kuasi-eksperimen (Pennycook et al., 2020). Ketiga, penelitian menempatkan literasi digital dalam kerangka etika, kewargaan digital, tata kelola platform, dan penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab (Frau-Meigs, 2024). Secara keseluruhan, literatur telah menjelaskan hubungan antara kompetensi digital, ketahanan terhadap disinformasi, dan perilaku bermedia, tetapi integrasi ketiganya sebagai kebijakan kelembagaan perguruan tinggi masih belum menjadi arus utama.

Kecenderungan pertama berorientasi pada pemetaan konsep dan pengukuran kompetensi digital di pendidikan tinggi. Spante et al (2018) melalui tinjauan sistematis menunjukkan bahwa istilah *digital literacy* dan *digital competence* sering digunakan secara tumpang tindih, dengan penekanan berbeda pada keterampilan teknis, kapasitas kognitif, dan praktik sosial. Zhao et al (2021) memperluas peta tersebut melalui telaah penelitian pendidikan tinggi periode 2015–2021 dan menemukan dominasi studi yang mendefinisikan



dimensi kompetensi, mengembangkan instrumen, serta mengukur tingkat kesiapan digital. Kerangka DigComp 2.2 kemudian mengorganisasi kompetensi ke dalam literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, penciptaan konten, keamanan, dan pemecahan masalah (Becker, 1982). Dalam konteks evaluasi berita, Luo et al (2022) menggunakan survei dan *importance performance analysis* untuk menghubungkan literasi media baru dengan kemampuan mahasiswa menggunakan atribut keterpercayaan berita. Pola penelitian ini memberi dasar konseptual dan indikator pengukuran yang kuat, tetapi orientasinya cenderung individualistik: mahasiswa diposisikan sebagai pemilik kompetensi yang dapat diukur, sedangkan pengaruh kurikulum, budaya kampus, prosedur kelembagaan, dan pembagian tanggung jawab antarunit belum dianalisis secara mendalam.

Kecenderungan kedua berfokus pada efektivitas intervensi pendidikan dan psikologis dalam mengurangi kerentanan terhadap disinformasi. Wineburg & McGrew (2019) mengembangkan konsep *lateral reading*, yaitu memeriksa kredibilitas suatu situs dengan meninggalkan halaman tersebut dan membandingkannya dengan sumber lain. McGrew (2024) selanjutnya menunjukkan bahwa strategi ini dapat diajarkan secara eksplisit. Guess et al (2020), melalui eksperimen di Amerika Serikat dan India, menemukan bahwa intervensi literasi media digital meningkatkan kemampuan membedakan berita arus utama dan berita palsu, walaupun pengaruhnya bervariasi menurut konteks. Pennycook et al (2020) menguji *accuracy nudge* yang mengarahkan perhatian pengguna pada ketepatan sebelum membagikan informasi. Sementara itu, Roozenbeek et al (2022) menggunakan pendekatan inokulasi psikologis atau *prebunking* untuk mengenalkan teknik manipulasi sebelum pengguna terpapar konten menyesatkan. Kekuatan pola ini terletak pada desain eksperimental dan pengukuran perubahan kemampuan atau keputusan berbagi. Namun, sebagian besar intervensi bersifat singkat, berpusat pada individu, dan belum menjelaskan bagaimana hasil eksperimen diterjemahkan menjadi kurikulum, kode etik, layanan verifikasi, serta evaluasi rutin di perguruan tinggi.

Kecenderungan ketiga mengarahkan perhatian pada etika komunikasi, tata kelola digital, dan tanggung jawab institusi. UNESCO (2021) menempatkan literasi media dan informasi sebagai dasar bagi pencarian kebenaran, kebebasan berekspresi, partisipasi warga, serta penggunaan teknologi yang berpusat pada manusia. Dalam konteks kecerdasan buatan generatif, Boonlue (2024) menekankan perlunya regulasi, perlindungan data, transparansi penggunaan, verifikasi keluaran, dan tanggung jawab manusia atas hasil akhir. Frau-Meigs (2024) memperluasnya dengan menunjukkan bahwa respons literasi media terhadap kecerdasan buatan perlu mencakup disinformasi, ujaran kebencian, privasi, hak data, dan reliabilitas sumber. OECD (2024) juga mengusulkan pendekatan yang menggabungkan pendidikan, penguatan institusi, transparansi platform, dan perlindungan hak untuk menjaga integritas informasi. Literatur dalam pola ini umumnya menggunakan



analisis kebijakan, kerangka normatif, laporan kelembagaan, atau sintesis konseptual, bukan eksperimen terhadap satu keterampilan. Kontribusinya adalah memperluas literasi digital dari kemampuan pribadi menjadi persoalan hak, norma, dan tata kelola. Meskipun demikian, rekomendasinya sering berada pada tingkat makro dan belum dirumuskan menjadi pembagian program, pelaksana, indikator, serta mekanisme akuntabilitas yang operasional di lingkungan kampus.

Ketiga kecenderungan tersebut telah membangun dasar pengetahuan yang penting, tetapi masih “melupakan” keterhubungan antara perubahan kompetensi mahasiswa dan kapasitas kelembagaan yang memungkinkan perilaku digital etis berlangsung secara konsisten. Studi kompetensi banyak mengukur apa yang diketahui atau dapat dilakukan mahasiswa, tetapi kurang memeriksa apakah kurikulum, dosen, perpustakaan, unit teknologi informasi, kemahasiswaan, humas, dan penjaminan mutu bekerja dalam arah yang sama. Studi intervensi membuktikan bahwa *lateral reading*, *accuracy prompts*, pemeriksaan fakta, dan *prebunking* dapat meningkatkan ketelitian, tetapi belum cukup menjelaskan keberlanjutan efek, pelembagaan program, atau penanganan setelah pelanggaran terjadi. Sebaliknya, kajian kebijakan dan etika telah menawarkan prinsip normatif, tetapi sering belum menghubungkannya dengan asesmen pembelajaran dan indikator perubahan perilaku. Literatur juga cenderung memisahkan pencegahan disinformasi dari etika komunikasi, padahal keputusan menyebarkan, mengoreksi, atau menolak suatu pesan selalu melibatkan kebenaran, privasi, martabat, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penyatuan literasi informasi, intervensi pendidikan, etika komunikasi, teknologi, dan akuntabilitas dalam satu model implementasi kebijakan perguruan tinggi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan arah baru dengan memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan literasi digital melalui perspektif *whole-of-institution*. Fokusnya bukan hanya menilai apakah mahasiswa memiliki keterampilan digital, tetapi menjelaskan bagaimana regulasi, pendidikan, budaya, teknologi, dan akuntabilitas saling berhubungan dalam mencegah disinformasi serta membentuk etika komunikasi. Regulasi menetapkan hak, kewajiban, standar, dan prosedur; pendidikan mengintegrasikan verifikasi informasi, literasi algoritma, keamanan digital, serta literasi kecerdasan buatan ke dalam capaian pembelajaran dan asesmen; budaya memperkuat norma dialog, koreksi, dan tanggung jawab; teknologi menyediakan portal resmi, kanal aduan, keamanan, dan dukungan verifikasi; sedangkan akuntabilitas memastikan pemantauan dan perbaikan berbasis data. Dengan desain kajian literatur integratif, penelitian memadukan bukti eksperimen, survei, tinjauan sistematis, artikel konseptual, dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi pola yang konsisten serta membangun model operasional. Arah ini menghasilkan proposisi bahwa semakin



terintegrasi kelima dimensi tersebut, semakin kuat kemampuan mahasiswa memverifikasi informasi, menahan diri dari penyebaran tanpa pemeriksaan, melindungi privasi, dan berkomunikasi secara jujur serta beradab.

METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah artefak dokumenter berupa artikel ilmiah, artikel konseptual, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang membahas implementasi literasi digital di perguruan tinggi. Fokus analisis tidak diarahkan pada mahasiswa atau dosen sebagai individu yang diwawancarai, melainkan pada gagasan, temuan empiris, model intervensi, dan rekomendasi kelembagaan yang terkandung dalam setiap dokumen. Objek substantifnya ialah institusi perguruan tinggi sebagai ruang penerapan kebijakan untuk mencegah disinformasi dan meningkatkan etika komunikasi mahasiswa. Setiap dokumen diperlakukan sebagai satu unit sumber, sedangkan bagian-bagian yang memuat desain kebijakan, integrasi kurikulum, strategi pembelajaran, tata kelola, penggunaan teknologi, hambatan implementasi, serta evaluasi program menjadi unit makna yang dibandingkan. Penetapan unit analisis semacam ini memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan antara kompetensi mahasiswa dan kapasitas kelembagaan tanpa mengurangi persoalan menjadi keterampilan teknis individual. Dengan demikian, penelitian memusatkan perhatian pada bagaimana regulasi, pendidikan, budaya digital, teknologi, dan akuntabilitas dibangun sebagai satu sistem kebijakan perguruan tinggi dalam konteks transformasi komunikasi digital kontemporer.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur integratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan menghitung besarnya pengaruh antarvariabel atau melakukan pengujian statistik, melainkan menafsirkan, membandingkan, dan menyintesis konsep, pola, serta argumentasi yang tersebar dalam berbagai jenis sumber. Kajian integratif memungkinkan penelitian menggabungkan hasil penelitian empiris, artikel konseptual, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan untuk menghasilkan pemahaman baru serta model konseptual yang lebih menyeluruh. Desain ini sesuai untuk isu literasi digital karena pembahasannya melibatkan dimensi pendidikan, komunikasi, teknologi, etika, dan tata kelola yang tidak selalu diteliti dengan metode yang sama. Pelaksanaan kajian dilakukan secara terstruktur melalui perumusan fokus, penelusuran sumber, penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, pemetaan karakteristik dokumen, pengodean tematik, perbandingan temuan, dan penyusunan sintesis. Kajian ini tidak menggunakan desain metode campuran karena tidak mengumpulkan data kuantitatif primer, meskipun hasil penelitian kuantitatif terdahulu tetap dianalisis sebagai bagian dari bukti literatur yang memperkuat penafsiran dan penyusunan model kebijakan (Torraco, 2016).



Sumber data penelitian seluruhnya merupakan data sekunder berbentuk teks. Korpus kajian terdiri atas 32 sumber yang diterbitkan pada 2020–2025, meliputi artikel jurnal empiris, artikel konseptual, laporan lembaga internasional, kerangka kompetensi digital, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pendidikan tinggi. Sumber dipilih karena membahas sekurang-kurangnya satu aspek utama penelitian, yaitu kebijakan literasi digital, literasi media dan informasi, misinformasi atau disinformasi, etika komunikasi, mahasiswa, pemeriksaan fakta, *prebunking*, kewargaan digital, atau tata kelola perguruan tinggi. Artikel penelitian digunakan untuk memahami mekanisme intervensi dan hasil pembelajaran, sedangkan laporan resmi dan dokumen kebijakan digunakan untuk menganalisis prinsip, standar, serta bentuk dukungan kelembagaan. Sumber yang hanya membahas kemampuan menjalankan perangkat tanpa menghubungkannya dengan evaluasi informasi, tanggung jawab komunikasi, atau implikasi pendidikan tinggi dikeluarkan. Penelitian tidak menggunakan informan, responden, data visual, maupun audiovisual sebagai data primer. Keragaman jenis dokumen tetap dipertahankan agar sintesis dapat mempertemukan bukti empiris dan argumentasi normatif secara seimbang serta mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi dokumen secara bertahap, bukan melalui observasi lapangan, survei, wawancara, diskusi kelompok terpusat, atau dialog dengan informan. Tahap pertama ialah menetapkan fokus dan kata kunci pencarian, yaitu *digital literacy policy*, *media and information literacy*, *misinformation*, *disinformation*, *communication ethics*, *university students*, *higher education*, *fact-checking*, *prebunking*, dan *digital citizenship*. Tahap kedua ialah menelusuri artikel melalui basis data ilmiah serta mencari laporan dan dokumen kebijakan melalui situs resmi lembaga terkait. Tahap ketiga ialah memeriksa judul, abstrak, tahun terbit, relevansi tema, kejelasan metode atau argumentasi, dan implikasinya bagi pendidikan tinggi. Tahap keempat ialah membaca teks lengkap serta menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menetapkan 32 sumber akhir. Data penting dari setiap dokumen kemudian dicatat dalam lembar pemetaan yang memuat identitas sumber, konteks, tujuan, metode, konsep utama, temuan, keterbatasan, dan rekomendasi. Proses identifikasi dan seleksi didokumentasikan secara transparan dengan prinsip pelaporan yang sejalan dengan PRISMA 2020, tanpa menempatkan penelitian ini sebagai meta-analisis (Page et al., 2021).

Analisis data dilaksanakan melalui empat tahap yang saling berkaitan. Pertama, seluruh sumber dipetakan berdasarkan fokus, konteks penelitian, pendekatan, metode, temuan utama, keterbatasan, dan rekomendasi. Kedua, isi dokumen dikodekan secara tematik ke dalam lima kategori awal, yaitu desain kebijakan, integrasi kurikulum, strategi pembelajaran, tata kelola kelembagaan, dan evaluasi. Selama pembacaan, kategori tersebut dikembangkan secara reflektif untuk menangkap tema regulasi, pendidikan, budaya



digital, dukungan teknologi, dan akuntabilitas. Ketiga, temuan antarsumber dibandingkan untuk mengenali pola yang konsisten, perbedaan konteks, pertentangan hasil, serta kesenjangan penelitian. Keempat, hubungan antartema disintesis secara argumentatif menjadi model implementasi kebijakan literasi digital di perguruan tinggi. Analisis tematik digunakan bukan sekadar untuk menghitung kemunculan istilah, tetapi untuk menafsirkan makna dan hubungan konseptual yang dibangun oleh sumber. Kredibilitas interpretasi dijaga melalui penggunaan sumber yang beragam, prioritas pada publikasi bereputasi dan dokumen resmi, pencatatan keputusan analitis, serta pemeriksaan kesesuaian antara tema dan bukti. Prinsip ini sejalan dengan Braun & Clarke (2021) yang menempatkan tema sebagai hasil keterlibatan analitis yang transparan dan reflektif.

RESULT AND DISCUSSION

Result

Transformasi Literasi Digital Menjadi Kompetensi Kritis dan Etis

Hasil pengodean terhadap 32 sumber menunjukkan perubahan yang jelas dalam cara literasi digital dipahami di perguruan tinggi. Data tekstual yang dibaca tidak lagi menempatkan literasi digital hanya sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi sebagai kemampuan membedakan fakta, opini, satire, propaganda, konten sintetis, dan klaim yang tidak didukung bukti. Dokumen juga berulang kali menekankan penelusuran sumber primer, pemeriksaan reputasi sumber melalui *lateral reading*, pengenalan konteks produksi pesan, serta penundaan membagikan informasi sebelum verifikasi dilakukan. Jones-Jang et al (2021) memperlihatkan bahwa literasi informasi lebih berkaitan dengan pengenalan berita palsu dibandingkan jenis literasi lain, sedangkan Luo et al (2022) menghubungkan literasi media baru dengan penggunaan atribut keterpercayaan berita. Kops et al (2025) selanjutnya memetakan bahwa respons kaum muda terhadap informasi palsu dipengaruhi kemampuan evaluasi, karakter pesan, lingkungan sosial, dan bentuk intervensi. Bukti ini memperlihatkan terjadinya transformasi dari orientasi teknis menuju orientasi epistemik, kritis, dan etis. Dengan demikian, kompetensi digital mahasiswa harus dibaca sebagai kapasitas menilai kebenaran sekaligus mempertanggungjawabkan dampak komunikasi.



Tabel 1. Transformasi Kompetensi Literasi Digital

Aspek yang Dianalisis	Bukti dalam Literatur	Pernyataan Ulang	Pola Temuan
Evaluasi informasi	Pemeriksaan sumber, bukti, konteks, dan kredibilitas	Mahasiswa harus mampu menilai kebenaran informasi	Kompetensi epistemik
Kebiasaan verifikasi	Menunda berbagi dan membandingkan sumber	Verifikasi harus menjadi kebiasaan akademik	Perubahan perilaku
Etika komunikasi	Privasi, atribusi, martabat, dan koreksi	Kebenaran tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab	Orientasi etis
Literasi kecerdasan buatan	Audit keluaran, bias, data, dan referensi	Konten sintetis tetap memerlukan pemeriksaan manusia	Perluasan objek literasi

Secara lebih sederhana, data tersebut menyatakan bahwa mahasiswa belum dapat disebut memiliki literasi digital hanya karena mampu menggunakan mesin pencari, media sosial, aplikasi pembelajaran, atau kecerdasan buatan. Kemampuan teknis baru menjadi bermakna apabila disertai kebiasaan bertanya siapa pembuat pesan, bukti apa yang digunakan, kepentingan apa yang mungkin bekerja, apakah informasi sesuai konteks, dan konsekuensi apa yang timbul ketika pesan dibagikan. Perubahan ini semakin penting karena keluaran kecerdasan buatan dapat disusun dalam bahasa yang meyakinkan, tetapi tetap berpotensi memuat kekeliruan, bias, atau rujukan yang tidak dapat diverifikasi. UNESCO menempatkan verifikasi, transparansi penggunaan, perlindungan data, dan tanggung jawab manusia sebagai unsur penting pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan (Boonlue, 2024). Pernyataan ulang hasil ini menegaskan bahwa objek utama kebijakan bukan sekadar akses teknologi, melainkan kualitas keputusan mahasiswa ketika menerima, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Oleh sebab itu, literasi informasi, pemahaman algoritma, keamanan digital, literasi kecerdasan buatan, dan etika dialog harus dikembangkan secara bersamaan, bukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri.

Deskripsi lintas sumber menghasilkan empat pola pada bukti pertama. Pertama, literasi digital bersifat multidimensional karena menggabungkan evaluasi informasi, komunikasi, penciptaan konten, keamanan, dan pemecahan masalah sebagaimana dirumuskan dalam DigComp 2.2. Kedua, ketahanan terhadap disinformasi dipengaruhi kebiasaan verifikasi, bukan hanya pengetahuan deklaratif mengenai ciri berita palsu.



Ketiga, keputusan berbagi informasi merupakan persoalan etika karena melibatkan kejujuran, privasi, atribusi, martabat pihak lain, dan kesediaan mengoreksi kesalahan. Keempat, perkembangan kecerdasan buatan memperluas objek literasi dari berita dan media sosial menuju kemampuan mengaudit konten sintetis. Keempat pola tersebut membuktikan adanya perubahan sekaligus keadaan mendesak: mahasiswa berperan sebagai penerima dan produsen pesan, sedangkan arsitektur digital mempercepat sirkulasi informasi tanpa selalu memberi waktu untuk evaluasi. Temuan ini sejalan dengan naskah penelitian yang menempatkan kompetensi, kebiasaan, norma, dan sistem sebagai sasaran perubahan kebijakan. Artinya, pembentukan mahasiswa yang tahan terhadap disinformasi tidak dapat dicapai hanya dengan memberi daftar situs tepercaya, tetapi memerlukan pembiasaan penalaran, tanggung jawab sosial, serta dukungan kelembagaan yang konsisten.

Integrasi Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Kasus

Bukti kedua menunjukkan bahwa solusi yang paling konsisten dalam literatur adalah pengintegrasian latihan verifikasi ke dalam pembelajaran berbasis kasus dan pengalaman. Data yang dibaca memperlihatkan beberapa bentuk intervensi, yaitu *lateral reading* untuk memeriksa reputasi sumber, *accuracy prompts* untuk mengaktifkan perhatian pada akurasi, *prebunking* untuk mengenalkan teknik manipulasi sebelum paparan, *fact-checking* untuk menguji klaim dengan bukti, serta pencarian gambar terbalik untuk memeriksa visual di luar konteks. Guess et al (2020) menemukan bahwa intervensi literasi media meningkatkan kemampuan membedakan berita arus utama dan berita palsu. Pennycook et al (2020) menunjukkan bahwa pengingat akurasi dapat memperbaiki kualitas keputusan berbagi, sedangkan Roozenbeek et al (2022) memperlihatkan bahwa inokulasi psikologis meningkatkan ketahanan terhadap teknik manipulasi. Pada pendidikan tinggi, Scheibenzuber et al (2021) merancang kursus berbasis masalah yang menghubungkan pemahaman bentuk berita palsu dengan pengujian kredibilitas. Meta-analisis Huang et al (2024) terhadap 49 studi eksperimen juga menunjukkan bahwa intervensi literasi media pada umumnya meningkatkan ketahanan terhadap misinformasi, terutama ketika dilaksanakan dalam beberapa sesi dan bukan hanya sekali.



Tabel 2. Strategi Pembelajaran Pencegahan Disinformasi

Strategi	Mekanisme Utama	Contoh Aktivitas Mahasiswa	Hasil yang Diharapkan
<i>Lateral reading</i>	Membandingkan reputasi sumber	Membuka sumber lain sebelum mempercayai situs	Ketepatan evaluasi sumber
<i>Accuracy prompts</i>	Mengaktifkan perhatian pada akurasi	Menilai kebenaran sebelum membagikan pesan	Penurunan berbagi tanpa verifikasi
<i>Prebunking</i>	Mengenalkan teknik manipulasi lebih awal	Mengidentifikasi emosi dan otoritas semu	Ketahanan terhadap manipulasi
Pemeriksaan fakta	Menguji klaim dengan bukti	Menelusuri sumber primer dan data resmi	Kemampuan koreksi berbasis bukti
Verifikasi visual	Memeriksa konteks gambar dan video	Pencarian gambar terbalik	Ketahanan terhadap manipulasi visual
Pembelajaran berbasis masalah	Menghubungkan kasus dan keputusan etis	Analisis kasus serta simulasi krisis	Penalaran kritis dan bertanggung jawab

Penyajian ulang bukti kedua memperlihatkan bahwa ceramah tunggal mengenai bahaya hoaks tidak memadai untuk menghasilkan perubahan perilaku yang bertahan. Mahasiswa perlu berlatih dengan klaim nyata, membandingkan liputan, menelusuri sumber primer, memeriksa gambar, mengaudit jawaban kecerdasan buatan, dan menyusun koreksi yang tetap menghormati pihak lain. Latihan tersebut dapat dimasukkan ke dalam mata kuliah metodologi penelitian, bahasa, kewarganegaraan, komunikasi, pendidikan agama, maupun mata kuliah keahlian tanpa harus selalu membentuk mata kuliah baru. Kuncinya adalah menetapkan capaian pembelajaran, aktivitas, dan asesmen yang secara eksplisit mengukur proses verifikasi serta pertimbangan etis. Mahasiswa juga perlu menerima umpan balik atas alasan yang digunakan, bukan hanya diberi penilaian benar atau salah. Penekanan pada proses penting karena informasi palsu terus berubah, sedangkan pola manipulasi—seperti otoritas semu, konteks terpotong, dikotomi palsu,



emosi berlebihan, dan konsensus yang direayasa hingga cenderung berulang. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif mengubah verifikasi dari pengetahuan tambahan menjadi kebiasaan akademik yang digunakan dalam tugas, diskusi, organisasi mahasiswa, dan komunikasi sehari-hari.

Deskripsi terhadap bukti kedua menghasilkan empat kecenderungan. Pertama, intervensi aktif lebih menjanjikan daripada penyampaian informasi pasif karena mahasiswa melakukan sendiri proses pencarian, perbandingan, dan penilaian bukti. Kedua, pembelajaran berbasis masalah mempertemukan kompetensi kognitif dengan dilema etis, sehingga mahasiswa tidak hanya menilai apakah pesan salah, tetapi juga menentukan cara mengoreksi tanpa memperlakukan atau memperbesar kerusakan. Ketiga, pengulangan dan integrasi lintas mata kuliah lebih kuat daripada seminar insidental, temuan meta-analitik Huang et al (2024) mendukung pentingnya beberapa sesi untuk membangun ketahanan. Keempat, asesmen perlu bergerak dari pengukuran kehadiran dan sertifikat menuju tes berbasis kasus, portofolio verifikasi, audit tugas, serta pengamatan perubahan perilaku berbagi. Pola ini menguatkan argumen bahwa solusi pendidikan harus berkelanjutan, kontekstual, dan dapat dievaluasi. Meskipun berbagai intervensi telah terbukti meningkatkan ketelitian, hasilnya tidak otomatis menjadi kebijakan kampus. Keberlanjutan baru tercapai apabila program studi, dosen, perpustakaan, dan unit kemahasiswaan menggunakan kerangka kompetensi yang sama serta menyediakan ruang latihan dan umpan balik secara rutin.

Model Tata Kelola Literasi Digital Berbasis Institusi

Bukti ketiga memperlihatkan bahwa keberhasilan literasi digital ditentukan oleh tata kelola institusi, bukan hanya oleh kemampuan individu. Data dokumen menunjukkan keterlibatan sembilan unsur kelembagaan, yaitu pimpinan, program studi, dosen, perpustakaan, unit teknologi informasi, kemahasiswaan, hubungan masyarakat, penjaminan mutu, dan organisasi mahasiswa sebagai mitra. Naskah sumber merangkum lima dimensi kebijakan, yaitu regulasi, pendidikan, budaya, teknologi, dan akuntabilitas. Regulasi mencakup kebijakan, kode etik, dan prosedur penanganan insiden sehingga pendidikan mencakup capaian pembelajaran, rencana pembelajaran, tugas verifikasi, dan asesmen kasus. Budaya mencakup kampanye, duta digital, serta dialog beradab dan teknologi mencakup portal informasi resmi, kanal aduan, keamanan, dan dukungan pemeriksaan. Sedangkan akuntabilitas mencakup pemantauan, audit, dan evaluasi longitudinal. OECD (2024) juga menekankan bahwa respons terhadap disinformasi memerlukan kombinasi pendidikan, penguatan institusi, transparansi, dan perlindungan hak. Data tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang terfragmentasi akan bergantung pada inisiatif individu, sedangkan model lintas unit memungkinkan standar, sumber daya,



pelayanan, dan evaluasi bergerak menuju tujuan yang sama secara terencana dan berkelanjutan.

Tabel 3. Model Implementasi Kebijakan Literasi Digital di Perguruan Tinggi

Dimensi	Program Utama	Pelaksana	Indikator
Regulasi	Kebijakan, kode etik, prosedur insiden digital	Pimpinan, bidang hukum, kemahasiswaan	Kebijakan berlaku, dipahami, dan digunakan
Pendidikan	Capaian pembelajaran, tugas verifikasi, asesmen kasus	Program studi, dosen, perpustakaan	Peningkatan kemampuan evaluasi informasi
Budaya	Kampanye, duta digital, dialog, fasilitator sebaya	Mahasiswa, humas, organisasi mahasiswa	Penurunan perilaku berbagi tanpa verifikasi
Teknologi	Portal resmi, kanal aduan, keamanan data	Unit teknologi, perpustakaan, humas	Akses informasi dan respons yang cepat
Akuntabilitas	Pemantauan, audit, evaluasi longitudinal	Penjaminan mutu dan pimpinan	Perbaikan program berbasis data

Dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, bukti ketiga menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak cukup menerbitkan larangan menyebarkan hoaks atau menggunakan kecerdasan buatan secara tidak bertanggung jawab. Aturan perlu diterjemahkan menjadi pembelajaran, layanan, dukungan teknologi, mekanisme pengaduan, dan prosedur pemulihan. Kode etik, misalnya, harus menjelaskan plagiarisme digital, perundungan siber, penyebaran data pribadi, manipulasi konten, serangan melalui akun anonim, serta transparansi penggunaan kecerdasan buatan. Namun, pendekatan sanksi saja berisiko menghasilkan kepatuhan semu. Karena itu, kebijakan perlu menyediakan edukasi, mediasi, konseling, koreksi terbuka, dan kesempatan memperbaiki kerusakan komunikasi. Kepemimpinan menentukan arah dan sumber daya, dosen membangun Latihan, perpustakaan mendukung evaluasi sumber, unit teknologi menjaga keamanan, hubungan masyarakat menyediakan informasi resmi, kemahasiswaan mengembangkan budaya dan penjaminan mutu memantau capaian. Mahasiswa juga perlu dilibatkan sebagai perancang, fasilitator sebaya, pemeriksa fakta, dan produsen konten edukatif. Pernyataan ulang ini menunjukkan bahwa etika komunikasi akan lebih efektif ketika menjadi pengalaman kelembagaan sehari-hari, bukan hanya materi normatif atau ancaman hukuman.



Deskripsi terhadap tata kelola menghasilkan empat pola utama. Pertama, keberhasilan implementasi ditopang komitmen pimpinan dan pembagian peran yang jelas, sebab program lintas unit membutuhkan legitimasi, anggaran, dan koordinasi. Kedua, budaya partisipatif memperkuat penerimaan kebijakan karena mahasiswa tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek pengawasan. Ketiga, dukungan teknologi harus dipadukan dengan perlindungan privasi dan akuntabilitas agar portal resmi, kanal aduan, atau alat verifikasi tidak berubah menjadi instrumen pemantauan berlebihan. Keempat, evaluasi harus mengukur kemampuan memverifikasi, perilaku berbagi, kualitas respons insiden, pemahaman etika, dan persepsi keamanan komunikasi, bukan hanya jumlah peserta. Data juga memperlihatkan hambatan berupa variasi kompetensi dosen, keterbatasan waktu dan anggaran, fragmentasi unit, resistensi, serta kesulitan mengukur perilaku. Karena itu, implementasi dapat dilakukan bertahap melalui pemetaan kebutuhan, penetapan kompetensi minimum, pelatihan dosen inti, uji coba pada beberapa mata kuliah, evaluasi, lalu perluasan ke sistem penjaminan mutu. Pola ini menegaskan bahwa transformasi kelembagaan memerlukan desain realistis, berurutan, berbasis data, dan tetap menjaga kebebasan akademik serta hak berbeda pendapat.

Discussion

Penelitian ini menelaah implementasi kebijakan literasi digital dalam mencegah disinformasi dan meningkatkan etika komunikasi mahasiswa melalui kajian integratif terhadap 32 sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil sintesis menghasilkan tiga temuan besar. Pertama, literasi digital telah mengalami transformasi dari keterampilan teknis menjadi kompetensi epistemik, kritis, aman, dan etis yang mencakup verifikasi informasi, pemahaman algoritma, perlindungan privasi, serta audit konten kecerdasan buatan. Kedua, perubahan kemampuan dan perilaku lebih mungkin terjadi melalui pembelajaran aktif berbasis kasus, seperti *lateral reading*, *accuracy prompts*, *prebunking*, pemeriksaan fakta, dan evaluasi visual, yang diintegrasikan ke dalam kurikulum dan asesmen. Ketiga, keberlanjutan program ditentukan oleh pendekatan menyeluruh berbasis institusi yang menghubungkan regulasi, pendidikan, budaya, teknologi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, keluaran utama penelitian bukan sekadar daftar kompetensi atau teknik pembelajaran, melainkan model implementasi kebijakan yang membagi peran pimpinan, program studi, dosen, perpustakaan, unit teknologi, kemahasiswaan, hubungan masyarakat, penjaminan mutu, dan organisasi mahasiswa. Model tersebut menempatkan kompetensi individu dan kapasitas institusi sebagai dua unsur yang harus berkembang secara bersamaan.

Hubungan antara kebijakan literasi digital, pencegahan disinformasi, dan etika komunikasi dapat dijelaskan melalui mekanisme berlapis. Kompetensi verifikasi membantu mahasiswa mengenali kelemahan bukti, tetapi kompetensi tersebut tidak selalu



digunakan ketika perhatian diarahkan pada kecepatan, emosi, identitas kelompok, atau dorongan memperoleh keterlibatan. Karena itu, *accuracy prompts* dan latihan berbasis kasus bekerja dengan mengaktifkan pertimbangan akurasi pada saat keputusan dibuat (Pennycook & Rand, 2021). *Prebunking* bekerja dengan memperkenalkan pola manipulasi sebelum paparan, sehingga mahasiswa memiliki kerangka untuk mengenali teknik serupa pada konten baru (Roozenbeek et al., 2022). Namun, kemampuan individual akan mudah melemah apabila lingkungan kampus tidak menyediakan norma, pelayanan, dan insentif yang mendukung. Regulasi memberi standar, kurikulum membangun kemampuan, budaya memperkuat tanggung jawab, teknologi menyediakan sarana verifikasi dan keamanan, sedangkan akuntabilitas menjaga konsistensi. Hubungan sebab dan akibat yang muncul ialah semakin terintegrasi kelima dimensi tersebut, semakin besar peluang mahasiswa menunda pembagian informasi, memeriksa sumber, melindungi privasi, mengakui kesalahan, dan berkomunikasi secara beradab. Integrasi menjadi penting karena perilaku digital terbentuk melalui interaksi kemampuan pribadi dan lingkungan kelembagaan.

Hasil penelitian memiliki persamaan dengan studi terdahulu, tetapi sekaligus memperlihatkan perbedaan yang menjadi kebaruannya. Kesamaan pertama terdapat pada pemahaman bahwa literasi digital bersifat multidimensional, sebagaimana ditunjukkan Spante et al (2018). Kesamaan kedua ialah pengakuan bahwa literasi informasi berkaitan dengan kemampuan mengenali berita palsu (Jones-Jang et al., 2021). Kesamaan ketiga terdapat pada bukti efektivitas intervensi, mulai dari literasi media digital (Guess et al., 2020), pengingat akurasi (Pennycook et al., 2020), *lateral reading* (McGrew, 2024), hingga inokulasi psikologis (Roozenbeek et al., 2022). Perbedaannya, penelitian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada kompetensi individu, satu bentuk intervensi, atau pedoman normatif. Penelitian ini menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan tata kelola perguruan tinggi dalam satu model operasional yang memuat pelaksana, program, dan indikator. Kebaruan lainnya ialah penyatuan pencegahan disinformasi dengan etika komunikasi dan literasi kecerdasan buatan, sehingga keberhasilan tidak hanya dinilai dari kemampuan mengidentifikasi informasi salah, tetapi juga dari tanggung jawab dalam memproduksi, membagikan, mengoreksi, dan memulihkan dampak pesan.

Makna hasil penelitian perlu dipahami dalam konteks sosial ketika komunikasi akademik semakin bergantung pada platform, media sosial, aplikasi percakapan, dan kecerdasan buatan generatif. Secara historis, perguruan tinggi pernah menempatkan literasi informasi terutama pada kemampuan mencari dan menggunakan sumber akademik. Kini, persoalannya meluas karena mahasiswa tidak hanya membaca informasi, tetapi juga memproduksi, mengedit, menyebarkan, dan menguatkan pesan melalui interaksi digital. Secara ideologis, arsitektur komunikasi yang menilai popularitas melalui perhatian,



keterlibatan, dan kecepatan dapat bertentangan dengan nilai akademik yang membutuhkan ketelitian, keterbukaan bukti, dan kesediaan merevisi kesalahan. UNESCO menekankan pendekatan berpusat pada manusia, perlindungan data, dan tanggung jawab dalam penggunaan kecerdasan buatan pendidikan (Boonlue, 2024). Dalam konteks tersebut, model lima dimensi bermakna sebagai upaya mempertahankan otoritas pengetahuan tanpa menjadikan kampus represif. Kebijakan literasi digital bukan alat untuk menyeragamkan pendapat, melainkan infrastruktur agar kebebasan akademik dijalankan bersama tanggung jawab epistemik dan etis. Mahasiswa tetap berhak berbeda pandangan, tetapi klaim faktual harus terbuka terhadap verifikasi, koreksi, dan pertanggungjawaban.

Secara reflektif, hasil penelitian memiliki fungsi sekaligus potensi disfungsi. Fungsinya adalah memperkuat integritas akademik, kemampuan berpikir kritis, keamanan digital, kepercayaan terhadap komunikasi institusi, dan budaya dialog yang menghormati perbedaan. Integrasi ke dalam kurikulum juga membuat literasi digital tidak bergantung pada minat pribadi dosen atau kegiatan sementara. Layanan pemeriksaan fakta dan portal resmi dapat membantu mahasiswa memperoleh rujukan ketika berhadapan dengan klaim viral, sedangkan mekanisme mediasi dan pemulihan dapat mengurangi kerusakan sosial akibat komunikasi tidak etis. Namun, kebijakan dapat menimbulkan disfungsi apabila berubah menjadi pengawasan berlebihan, kriminalisasi kesalahan, pembatasan kritik, atau kewajiban administratif tanpa pembelajaran bermakna. Kesenjangan akses dan kompetensi juga dapat membuat sebagian mahasiswa lebih mudah dikenai sanksi daripada memperoleh dukungan. Selain itu, penggunaan alat deteksi otomatis dapat menghasilkan rasa aman palsu karena keputusan tetap membutuhkan penilaian manusia. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus memeriksa bukan hanya efektivitas, tetapi juga keadilan, transparansi, aksesibilitas, privasi, dan dampaknya terhadap kebebasan akademik. Keberhasilan sejati terletak pada terbentuknya tanggung jawab, bukan sekadar kepatuhan formal.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya rencana aksi bertahap pada tingkat perguruan tinggi. Tahap pertama ialah memetakan kebutuhan, jenis insiden, kompetensi mahasiswa dan dosen, serta layanan yang telah tersedia. Tahap kedua ialah menetapkan standar kompetensi minimum yang mencakup evaluasi sumber, verifikasi klaim dan visual, pemahaman algoritma, keamanan data, transparansi penggunaan kecerdasan buatan, dan etika koreksi. Tahap ketiga ialah mengintegrasikan standar tersebut ke capaian pembelajaran, rencana pembelajaran semester, tugas, rubrik, orientasi mahasiswa, dan pelatihan dosen. Tahap keempat ialah membangun dukungan kelembagaan melalui klinik cek fakta, portal informasi resmi, kanal aduan aman, panduan penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan, serta prosedur edukasi, mediasi, sanksi proporsional, dan pemulihan. Tahap kelima ialah melibatkan mahasiswa sebagai duta dan fasilitator sebaya



dengan supervisi akademik. Tahap terakhir ialah melakukan evaluasi berbasis tes kasus, portofolio, audit tugas, survei perilaku, dan analisis insiden. Data evaluasi harus dibahas lintas unit dan digunakan untuk memperbaiki kebijakan secara berkala, sehingga implementasi berkembang dari proyek terbatas menjadi bagian sistem penjaminan mutu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital di perguruan tinggi tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan menggunakan perangkat, mengakses platform, atau mengoperasikan aplikasi. Hikmah utama yang dapat diambil ialah bahwa pencegahan disinformasi dan pembentukan etika komunikasi mahasiswa hanya akan efektif apabila kemampuan verifikasi, kesadaran etis, budaya akademik, dukungan teknologi, dan tata kelola kelembagaan dikembangkan secara terpadu. Seminar atau kampanye sesaat memang dapat meningkatkan kesadaran, tetapi tidak cukup untuk membentuk kebiasaan mahasiswa dalam memeriksa sumber, menunda pembagian informasi, melindungi privasi, mengoreksi kesalahan, dan menggunakan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. Karena itu, kebijakan literasi digital harus hadir dalam kurikulum, pembelajaran berbasis kasus, layanan perpustakaan, tata kelola kemahasiswaan, komunikasi kelembagaan, sistem teknologi informasi, serta mekanisme penanganan pelanggaran. Pelajaran penting lainnya adalah bahwa kebebasan akademik dan tanggung jawab komunikasi bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan harus berjalan bersama agar kampus tetap menjadi ruang dialog yang kritis, terbuka, aman, dan beradab dalam kehidupan digital sehari-hari.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kemampuannya menyatukan temuan-temuan yang sebelumnya tersebar dalam kajian kompetensi digital, intervensi pencegahan disinformasi, etika komunikasi, kecerdasan buatan, dan tata kelola perguruan tinggi. Secara keilmuan, penelitian ini menyumbangkan model integratif yang menghubungkan lima dimensi utama, yaitu regulasi, pendidikan, budaya, teknologi, dan akuntabilitas. Model tersebut memperluas pemahaman literasi digital dari pendekatan individual menuju pendekatan kelembagaan yang melibatkan pimpinan, program studi, dosen, perpustakaan, unit teknologi informasi, kemahasiswaan, hubungan masyarakat, penjaminan mutu, dan organisasi mahasiswa. Penelitian ini juga memberikan sumbangan konseptual dengan menempatkan pencegahan disinformasi dan etika komunikasi sebagai dua proses yang saling berkaitan, sebab keputusan menerima, memproduksi, menyebarkan, atau mengoreksi informasi selalu melibatkan aspek kebenaran, privasi, martabat, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, kajian ini membuka pertanyaan baru mengenai bagaimana tingkat integrasi kebijakan memengaruhi perubahan perilaku mahasiswa, bagaimana efektivitas



setiap dimensi diukur, dan bagaimana kebijakan dapat diterapkan tanpa membatasi kebebasan akademik dalam praktik pendidikan tinggi secara empiris dan berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terutama berasal dari penggunaan desain kajian literatur integratif yang mengandalkan data sekunder berupa artikel ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan. Penelitian ini belum menguji model yang dihasilkan melalui data lapangan, sehingga belum dapat menunjukkan secara langsung bagaimana kebijakan literasi digital diterapkan, diterima, atau mengalami hambatan pada jenis perguruan tinggi yang berbeda. Korpus kajian juga dibatasi pada 32 sumber yang sebagian besar diterbitkan pada 2020–2025, sehingga temuan mungkin belum mencakup seluruh variasi disiplin ilmu, karakter mahasiswa, wilayah, dan ekosistem digital institusi. Selain itu, penelitian belum membandingkan efektivitas strategi seperti *lateral reading*, *accuracy prompts*, *prebunking*, pemeriksaan fakta, dan pembelajaran berbasis kasus dalam konteks kampus tertentu. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan studi kasus multisitus, survei longitudinal, eksperimen pendidikan, wawancara, serta evaluasi kebijakan untuk menguji hubungan antara regulasi, kurikulum, budaya, teknologi, dan akuntabilitas dengan kemampuan mahasiswa memverifikasi informasi dan berkomunikasi secara etis. Kajian lanjutan juga perlu memperhatikan privasi, ketimpangan akses, penggunaan kecerdasan buatan, dan potensi kebijakan berubah menjadi pengawasan berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Becker, J. (1982). Joint Research Centre. In *Nature* (Vol. 296, Issue 5855). Publications Office. <https://doi.org/10.1038/296283c0>
2. Boonlue, S. (2024). Guidance for Generative Ai in Education and Research" for Teachers. In *Journal of Industrial Education* (Vol. 23, Issue 2). UNESCO. <https://doi.org/10.55003/jie.23202>
3. Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
4. Frau-Meigs, D. (2024). *User empowerment through Media and Information Literacy responses to the evolution of Generative Artificial Intelligence (GAI)*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388547>
5. Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2020). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(27), 15536–15545. <https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117>



6. Huang, G., Jia, W., & Yu, W. (2024). Media Literacy Interventions Improve Resilience to Misinformation: A Meta-Analytic Investigation of Overall Effect and Moderating Factors. *Communication Research*. <https://doi.org/10.1177/00936502241288103>
7. Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., & Liu, J. (2021). Does Media Literacy Help Identification of Fake News? Information Literacy Helps, but Other Literacies Don't. *American Behavioral Scientist*, 65(2), 371-388. <https://doi.org/10.1177/0002764219869406>
8. Kops, M., Schittenhelm, C., & Wachs, S. (2025). Young people and false information: A scoping review of responses, influential factors, consequences, and prevention programs. *Computers in Human Behavior*, 169, 108650. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108650>
9. Luo, Y. F., Yang, S. C., & Kang, S. (2022). New media literacy and news trustworthiness: An application of importance-performance analysis. *Computers and Education*, 185, 104529. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104529>
10. McGrew, S. (2024). Teaching lateral reading: Interventions to help people read like fact checkers. *Current Opinion in Psychology*, 55, 101737. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101737>
11. OECD. (2024). Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity. In *Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en>
12. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLoS Medicine*, 18(3), 1-15. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003583>
13. Pennycook, G., McPhetres, J., Zhang, Y., Lu, J. G., & Rand, D. G. (2020). Fighting COVID-19 Misinformation on Social Media: Experimental Evidence for a Scalable Accuracy-Nudge Intervention. *Psychological Science*, 31(7), 770-780. <https://doi.org/10.1177/0956797620939054>
14. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The Psychology of Fake News. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
15. Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media.



Science Advances, 8(34), 6254. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6254>

16. Scheibenzuber, C., Hofer, S., & Nistor, N. (2021). Designing for fake news literacy training: A problem-based undergraduate online-course. *Computers in Human Behavior*, 121, 106796. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106796>
17. Spante, M., Hashemi, S. S., Lundin, M., & Algers, A. (2018). Digital competence and digital literacy in higher education research: Systematic review of concept use. *Cogent Education*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1519143>
18. Torraco, R. J. (2016). Writing Integrative Literature Reviews: Using the Past and Present to Explore the Future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
19. UNESCO. (2021a). AI and education: guidance for policy-makers. In *AI and education: guidance for policy-makers*. <https://doi.org/10.54675/pcsp7350>
20. UNESCO. (2021b). *Media and information literacy: Curriculum for educators and learners (updated guidance)*. UNESCO.
21. Wardle, C. (2018). The Need for Smarter Definitions and Practical, Timely Empirical Research on Information Disorder. *Digital Journalism*, 6(8), 951–963. <https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1502047>
22. Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Teachers College Record*, 121(11), 1–40. <https://doi.org/10.1177/016146811912101102>
23. Zhao, Y., Pinto Llorente, A. M., & Sánchez Gómez, M. C. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review. *Computers and Education*, 168, 104212. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212>

